

Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika Berbasis Era 4.0

Alikha Naya Dwi Azkhia^{1*}, Muhammad Jauhar Akmal², Tsalitsa Naylalmuna Az-Zahra³,
Zaenul Slam⁴

^{1,2,3,4} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: isnainiputri576@gmail.com

*Corresponding email: isnainiputri576@gmail.com

Abstrak - Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia melalui integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Perubahan ini tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan serius berupa disintegrasi moral, melemahnya karakter bangsa, serta ancaman terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah urgensi Pancasila sebagai sistem etika di era 4.0 menjadi sangat krusial. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini bersifat fundamental dan universal, menjadikan Pancasila sebagai sumber norma moral dan hukum yang memberikan tuntunan sikap dan perilaku, baik bagi individu maupun masyarakat secara kolektif. Di era disrupsi digital, Pancasila tampil sebagai fondasi etik sekaligus arah peradaban untuk memastikan bahwa teknologi tetap bekerja bagi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dapat menjadi landasan kuat bagi etika digital. Penerapannya mencakup penegakan standar etika di media sosial, pengembangan kebijakan digital berbasis Pancasila, serta pencegahan penyalahgunaan teknologi. Pancasila berperan sebagai landasan etik untuk mengarahkan inovasi iptek agar tidak menyimpang dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas bangsa. Strategi penguatan Pancasila di era 4.0 memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui peningkatan literasi digital berbasis Pancasila, penyusunan regulasi yang mendukung etika digital, serta penciptaan ruang digital yang inklusif. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan sosial di era digital, memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional di tengah percepatan kemajuan teknologi.

Kata kunci: Pancasila, sistem etika, Revolusi Industri 4.0, etika digital, moralitas bangsa

Abstract - The Industrial Revolution 4.0 has brought fundamental changes to various aspects of human life through the integration of digital technology, artificial intelligence, and automation. These changes not only present opportunities but also pose serious challenges, including moral disintegration, the weakening of national character, and threats to the noble values that have long served as the foundation of national and state life. In this context, the urgency of Pancasila as an ethical system in the 4.0 era becomes increasingly crucial. Pancasila as an ethical system means basing judgments of good and evil on the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. These values are fundamental and universal, making Pancasila a source of moral and legal norms that provide guidance for attitudes and behavior, both for individuals and society collectively. In the era of digital disruption, Pancasila emerges as an ethical foundation and a civilizational direction to ensure that technology continues to serve humanity, unity, democracy, and justice. Research indicates that Pancasila values—such as unity, justice, and humanity—can serve as a strong foundation for digital ethics. Its application includes upholding ethical standards on social media, developing Pancasila-based digital policies, and preventing the misuse of technology. Pancasila serves as an ethical foundation for guiding scientific and technological innovation so that it does not deviate from the goal of advancing the nation's intellectual life, while maintaining a balance between technological progress and national morality. Strategies for strengthening Pancasila in the 4.0 era require collaboration between the government, educational institutions, and society through enhancing Pancasila-based digital literacy, establishing regulations that support digital ethics, and creating inclusive online spaces. Thus, Pancasila remains relevant not only as a state ideology but also as a practical solution to social challenges in the digital era, reinforcing social cohesion and national identity amid rapid technological advancement.

Keywords: Pancasila, ethical system, Industrial Revolution 4.0, digital ethics, national morality



Pendahuluan

Etika adalah konsep yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Etika juga bisa dipandang sebagai seperangkat prinsip dan standar moral yang digunakan individu maupun kelompok untuk mengendalikan tindakannya. Jenis etika beragam, di antaranya etika deskriptif, normatif, dan meta-etika. Penerapan etika dapat dijumpai dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan pertemanan, pekerjaan, profesi, bisnis, maupun komunikasi. Peran etika sangat penting dalam membangun lingkungan yang tertib dan harmonis serta mengatur interaksi antarmanusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa, nilai-nilai etika tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata “panca” yang berarti lima, dan “sila” yang berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Indonesia adalah bangsa yang pluralistik, sehingga dibutuhkan pondasi kokoh sebagai perekat bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia mampu memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga mempersatukan keberagaman agama, etnis, budaya, maupun sejarah. Nilai-nilainya terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia dan tetap relevan di tengah arus globalisasi, menjadi penyemangat sekaligus pemersatu bangsa. Dengan demikian, penting untuk mengkaji Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia. Pemahaman ini diharapkan mampu mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pedoman menghadapi berbagai tantangan moral, sosial, maupun budaya di era globalisasi..

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan filosofis yang berkaitan dengan relevansi Pancasila sebagai sistem etika di tengah perubahan paradigma era Revolusi Industri 4.0.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek kajian, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis yang relevan. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan memahami dan menginterpretasikan



makna serta urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep, nilai, serta makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melalui metode studi kepustakaan, peneliti menelaah berbagai pemikiran dan teori yang relevan dari para ahli tanpa melakukan penelitian lapangan, sehingga kajian difokuskan pada analisis teoretis dan konseptual.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila secara harfiah dapat dipahami sebagai lima dasar pokok. Lima dasar tersebut kemudian dirumuskan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Makna ini selaras dengan penjelasan yang pernah dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Nilai-nilai Pancasila sejatinya sudah mengakar kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Sejarah dan adat istiadat masyarakat Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila seperti gotong royong, kebersamaan, serta nilai ketuhanan, meski bentuk kepercayaannya berbeda dengan masyarakat Indonesia saat ini. Atas dasar itulah, para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dengan harapan agar nilai-nilai tersebut dijunjung, dilestarikan, dan diamalkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang merujuk pada kebiasaan, adat istiadat, watak, serta cara berpikir yang menjadi dasar bagi manusia dalam menentukan suatu tindakan yang dinilai baik ataupun buruk. Dalam pengertian etimologis, etika dipahami sebagai ilmu yang mengkaji kebiasaan serta adat istiadat. Sementara itu, dalam bahasa perancis digunakan istilah “etiquette”, yang berarti sebuah aturan yang mengatur dan menetapkan segala tingkah laku dalam kehidupan sosial atau kehidupan dengan orang lain. Masyarakat Indonesia lebih mengenal etika sebagai tata krama yang

mengacu kepada sebuah kajian mengenai segala perilaku yang sifatnya baik dan bersifat dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika diantaranya:

- a. Kejujuran
- b. Intergeritas
- c. Komitmen
- d. Adil
- e. Peduli
- f. Bertanggung jawab
- g. Menaati apa yang telah disepakati

Etika juga dipandang sebagai filsafat moral yang berarti pemikiran yang rasional tentang mengapa dan bagaimana manusia harus menjalankan moralitas tertentu serta bagaimana manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatan moralitas tersebut.

Sistem berasal dari kata “systema” dalam bahasa Latin dan “sustēma” dalam bahasa Yunani, yang bermakna sekumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memudahkan aliran informasi maupun energi. Sementara itu, Murdik mengemukakan bahwa sistem adalah kegiatan yang dibentuk oleh elemen-elemen dengan melewati suatu prosedur tertentu sehingga dapat menghasilkan informasi, energi, atau barang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem, setiap elemen memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Setiap unsur dalam sistem memiliki peran masing-masing, namun saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Adapun ciri-ciri utama sistem meliputi: (a) memiliki komponen; (b) memiliki batas; (c) berada dalam lingkungan tertentu; (d) terdapat hubungan antarkomponen; (e) memiliki input, proses, dan output; (f) mengarah pada sasaran atau tujuan; serta (g) memiliki feedback.

Dalam Pancasila banyak terkandung nilai-nilai yang saling berhubungan, ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan etika dan sistem-sistemnya dalam Pancasila. Nilai yang terdapat dalam Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai sosial. Etika Pancasila terbentuk dari kelima nilai Pancasila tersebut. Pancasila juga sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki tujuan agar membentuk masyarakatnya menjadi pancasilais melalui setiap nilai Pancasila. Masyarakat yang pancasilais dapat terlihat dari segala tindakannya yang sesuai dengan setiap nilai

Pancasila. Bukan hanya kehidupan bermasyarakat saja yang harus mengacu pada Pancasila, juga sistem pemerintahan yang harus sejalan dengan ideologi bangsa, yakni ideologi Pancasila. Pengimplementasian nilai nilai Pancasila tersebut yang merupakan perwujudan etika Pancasila berdasarkan prinsip nilai dalam berkehidupan. Berikut ini penjabaran mengenai etika Pancasila.

- a. Etika Pancasila yang merupakan etika keutamaan yang susunannya berasal dari nilai nilai moral bangsa Indonesia karena etika keutamaan mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu masyarakat. Moral yang diutamakan dalam hal ini ialah rasa setia, jujur, ketulusan, serta sayang menyayangi. Etika keutamaan beranggapan bahwa orang yang bermoral melakukan tindakan atau perilaku yang baik yang merupakan bentukan dari pembelajaran atau pengalaman nyata yang pernah terjadi sepanjang hidupnya.
- b. Etika Pancasila sebagai etika teleologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita. Termasuk pada zaman yang semakin canggih seperti saat ini. Untuk mencapai segala tujuan dan cita cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diperlukan pendalaman pemahaman mengenai sistem nilai dari Pancasila agar setiap tindakan yang dilakukan tidak keluar dari ideologi negara.
- c. Etika Pancasila yang merupakan etika deontologis sebagai penuntun dalam menumbuhkan kesadaran dalam mengimplementasikan Pancasila kepada generasi bangsa khususnya generasi muda Indonesia untuk persiapannya menuju masa depan. Persiapan untuk generasi muda yang harus dikokohkan ialah kemampuan untuk beradaptasi dengan kebudayaan modern dan menyelaraskan sosio-kultural yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebab zaman akan membentuk setiap individu masyarakat menjadi pribadi yang lebih kompleks pada zamannya. Oleh karena itu, kemampuan para generasi muda harus terus ditingkatkan untuk membentuk pribadi unggul yang adaptif.

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Nilai-nilai setiap sila Pancasila terintegrasi menjadi suatu kaidah bagi generasi muda yang menuntun mereka untuk selalu memperluas jiwa kepandaiannya. Namun, kini banyak permasalahan yang sedari dulu sudah mengakar di Indonesia, seperti (1) aksi terorisme yang masih meresahkan masyarakat dengan mengatasnamakan agama sehingga membuat lunturnya toleransi antar umat beragama; (2) merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia; (3) kesenjangan sosial yang

membuat masyarakat kaya menjadi semakin kaya dan masyarakat miskin menjadi semakin miskin; dan (4) hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal tersebut menjadi bukti pentingnya etika Pancasila dalam mengarahkan atau sebagai prinsip utama dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Sehingga etika Pancasila sangat diharapkan sebagai tuntunan moral atau tatakrama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa urgensi, yaitu:

1. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai dan norma tersebut meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nilai dan norma tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik, mengambil keputusan kolektif, menyelesaikan masalah-masalah nasional, serta menjaga stabilitas dan harmoni nasional.
2. Pancasila sebagai dasar integrasi nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dapat mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul akibat dari pluralitas bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara, seperti komunisme, liberalisme, fundamentalisme, separatisme, dan lain-lain.
3. Pancasila sebagai landasan moral yang menginspirasi setiap warga negara Indonesia untuk berperilaku baik, adil, dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem etika menanamkan nilai-nilai budi pekerti, etos kerja, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, inovasi, dan prestasi. Nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Pancasila juga dapat menangkal adanya perilaku-perilaku negatif yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, terorisme, narkoba, dan lain-lain.

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.

2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.
4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.

B. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sekaligus menjadi pedoman perilaku dalam interaksi sosial. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila dibutuhkan sebagai sistem etika, antara lain:

1. Dekadensi Moral

Saat ini terjadi pergeseran dan penurunan moral di masyarakat, khususnya pada generasi muda. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan memunculkan perilaku negatif di tengah masyarakat. Kehadiran Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak tatanan nilai dan etika bangsa.

2. Korupsi yang Meluas

Meningkatnya kasus korupsi, terutama di kalangan pejabat negara, menunjukkan lemahnya integritas dalam menjalankan tugas. Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman moral agar pejabat maupun penyelenggara negara dapat membedakan mana tindakan yang benar dan salah, serta melaksanakan tanggung jawab dengan jujur dan berintegritas.

3. Kepatuhan terhadap Kewajiban Pajak

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, padahal pajak menjadi salah satu sumber utama pembangunan nasional. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan tumbuh kesadaran dan rasa tanggung jawab warga negara untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan bangsa.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)



Masih maraknya pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan etika, hubungan antarindividu dapat terjalin lebih baik, serta hak-hak setiap orang dapat dihormati dan dilindungi.

5. Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya kasus kerusakan lingkungan membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diwujudkan melalui regulasi yang tegas terhadap perusak lingkungan, sekaligus melalui sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan prinsip etika Pancasila

Kesimpulan

Pancasila memiliki urgensi yang tinggi sebagai sistem etika di era Revolusi Industri 4.0. Sebagai sistem nilai etika yang fundamental dan universal, Pancasila memberikan tuntunan sikap dan perilaku bagi individu maupun masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat. Di tengah disrupsi digital yang mengancam moralitas bangsa, Pancasila tampil sebagai fondasi etik sekaligus arah peradaban untuk memastikan bahwa teknologi tetap bekerja bagi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Era digital menghadirkan tantangan nyata terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, individualisme, pragmatisme, dan ketimpangan digital merupakan ancaman serius yang dapat melemahkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara jika tidak disikapi dengan bijaksana. Nilai-nilai Pancasila terbukti relevan dan dapat menjadi landasan kuat bagi etika digital. Penerapan Pancasila dalam konteks digital mencakup penegakan standar etika di media sosial, pengembangan kebijakan digital berbasis Pancasila, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi. Pancasila berperan sebagai pedoman dinamis yang mengarahkan inovasi teknologi agar tidak menyimpang dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penguatan Pancasila di era 4.0 memerlukan strategi komprehensif dan kolaboratif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui peningkatan literasi digital berbasis Pancasila, pendidikan adaptif dan berkarakter, pengembangan kebijakan digital yang berkeadilan, penciptaan ruang digital yang inklusif, serta penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Pancasila tetap relevan tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan sosial di era digital. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kemajuan

digital, Indonesia dapat menumbuhkan masyarakat yang inovatif namun tetap berlandaskan budaya, yang mampu menavigasi kompleksitas globalisasi sambil tetap menjaga identitas nasionalnya. Pancasila memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional di tengah percepatan kemajuan teknologi. Dengan demikian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika di era 4.0 tidak dapat ditawar-tawar. Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan energi moral yang hidup dan dinamis untuk membimbing bangsa Indonesia melintasi gelombang perubahan teknologi menuju masa depan yang berkeadilan, ber peradaban, dan bermartabat.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta: Panca (lima) dan Sila (dasar). Pancasila bukan sekadar hasil pemikiran mendadak, melainkan refleksi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu, seperti gotong royong, kebersamaan, dan nilai ketuhanan. Sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa, Pancasila harus terus dihormati, dijaga, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks etika, Pancasila menjadi sistem etika bangsa Indonesia karena memuat nilai-nilai moral yang bersifat universal dan relevan dalam kehidupan sosial, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Etika Pancasila terbentuk dari kombinasi tiga pendekatan etika:

1. Etika keutamaan, yang menekankan pembentukan karakter dan moral pribadi.
2. Etika teleologis, yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau cita-cita bangsa.
3. Etika deontologis, yang berfokus pada kewajiban moral dan tanggung jawab warga negara.

Sebagai sistem, Pancasila terdiri dari nilai-nilai yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, dan menjadi landasan tidak hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Urgensi penerapan Pancasila sebagai sistem etika semakin terasa di tengah berbagai permasalahan bangsa, seperti dekadensi moral, korupsi, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban negara seperti pajak. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, bermoral, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai benteng dari berbagai krisis etika dan moral yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini..

Referensi

- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11120–11125. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4200/3513>
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 8(1), 760–768. https://www.researchgate.net/profile/Sri-Amri/publication/335898355_Pancasila_Sebagai_Sistem_Etika/Links/5e9cc3c54585150839ebcd9a/Pancasila-Sebagai-Sistem-Etika.pdf
- Azkhya, C., Lutfya, Z., Sari, A. P., & Trisno, B. (2024). Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(3), 151–159. <https://ifrelresearch.org/index.php/garuda-widyakarya/article/view/3786/3870>
- Khairani, I. J., Pulungan, N. Z., & Dia, M. A. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 103–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.59061/guruku.v2i3.694>
- Priwardani, A. N., Monica, A. A. D., & Yasiin, M. N. F. (2023). Pancasila sebagai Sistem Etika. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 226–23. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79642/pdf>.
- Agustinova, D. E., & Miskawi. (2025). Pancasila dan Revolusi Industri 4.0: Menjaga Relevansi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Sangkala*, 4(2).
- Aristin, R. (2023). Upaya Membangun Ketahanan Moral Melalui Reaktualisasi Etika Pancasila Pada Generasi Z Di Era Revolusi Industri 4.0. *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura*.
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). Ekosistem Digital dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai Penuntun Etika Publik Virtual. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18–26.
- Mutanto. Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik Profil Pelajar Pancasila Era Revolusi Industri 4.0 di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Balikpapan (Studi Multikasus). *Digilib Universitas Mulawarman*.
- Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303–309